

PERENCANAAN ASPEK NON TEKNIS OPERASIONAL PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA MAGELANG

INTI SARI

Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas di kota Magelang mengakibatkan peningkatan jumlah sampah, yang kemudian akan diikuti dengan bertambah kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Oleh karenanya penanganan program di bidang persampahan harus menjadi prioritas dan digalakkan secara optimal sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan wilayah perkotaan, agar kualitas lingkungan dapat ditingkatkan. Masalah pengelolaan persampahan di Kota Magelang saat ini ditangani oleh Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup (DPLH) yang bekerjasama dengan pihak swasta dan swadaya masyarakat. Manusia, tatanan hukum, dan kelembagaannya merupakan faktor kunci dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Hukum dan peraturan harus disusun secara sistematis dan dievaluasi secara berkala untuk mengoptimalkan sistem. Kelembagaan untuk Kota Magelang idealnya diarahkan menuju pembentukan dinas dengan pengembangan kerjasama dengan swasta dan masyarakat. Perencanaan tarif retribusi menganut konsep subsidi silang dimana biaya dasar retribusi dibebankan sebesar 50% pada objek komersial, 40% pada objek keramaian dan 10% pada objek non komersial. Dengan adanya konsep pemisahan sampah dan daur ulang maka retribusi sampah yang dibebankan kepada masyarakat akan berkurang sebesar 63,87% pada tahun 2023, dan nilai retribusi berpotensi untuk tidak lagi dibebankan kepada masyarakat di masa depan. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan solusi yang efektif dalam meminimalkan biaya retribusi dan mengurangi sampah yang diolah di TPA.

Kata kunci: pengelolaan persampahan, hukum dan peraturan, retribusi, kelembagaan, partisipasi masyarakat

THE PLAN OF NON-OPERATIONAL TECHNIC ASPECTS OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN MAGELANG CITY

ABSTRACT

Population growth and rising activities in Magelang City have been increasing the amount of solid wastes which followed by the complexity of problem solving. Because of that, some actions in waste management field have to be in parallel with urban region development growth and expansion so that environmental quality can be increased. In Magelang City problems of solid waste management have been handled by DPLH (Environmental Control Department) in parallel with some private side and society participation. Human, law and enforcement structure along with its organizational aspects are the key factors in solid waste management in Indonesia. Law and enforcement has to be systematically compiled and evaluated to optimize the system. Organizational aspect for Magelang City ideally is instructed forming into a separate department (Cleanliness Department) among with private sector partnership and society cooperation. Retribution tariff planning embracing crossed subsidy concept which basic retribution tariff burdened equal to 50 % on commercial objects, 40% on bustle objects and 10 % on non commercial objects. Waste separation concept and recycling will reduce about 63,87% waste retribution burdened to society in 2023. And the retribution value no longer burdened to society in the future. Solid waste treatment based on society is an effective solution to minimize retribution cost and to reduce the amount of solid waste that have to be treat at The Final Disposal Plant.

Key words: solid waste management, law and enforcement, retribution, organizational, society participation